UPAYA HUKUM PEMEGANG POLIS ASURANSI BEASISWA BERENCANA ATAS TIDAK DIBAYARKANNYA KLAIM ASURANSI (AJB BUMIPUTERA 1912)

Allifah Khusnul Khotimah

E-mail: allifahkhusnul17@gmail.com

Staff Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk

Arief Suryono

E-mail: ariefsuryono@staff.uns.ac.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keywords: Legal action;
Agreement; Insurance

Kata Kunci: Upaya Hukum;
Perjanjian; Asuransi

Abstract

This study aims to find out how the holders of Scholarship Insurance Policy can be made for the non-payment of insurance claims by AJB Bumiputera 1912. The research method used is normative legal research. Sources of legal materials are used are primary legal materials, secondary legal materials, and legal material analysis techniques with the method of syllogism through deductive thinking patterns. Based on the results of research conducted by the author, it is known that the Policy Holder can make a complaint to the OJK for not paying a claim in accordance with the insurance agreement and is the right of the Policy Holder to choose to settle according to the applicable dispute settlement concept, either through court or out-of-court dispute settlement as stipulated in POJK No. 1/07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector. In addition, in the insurance claims are not fulfilled due to the occurrence of losses that are not possible to be saved at AJB Bumiputera 1912, the Policy Holder as a member can submit a request to dissolve AJB Bumiputera 1912 at the General Meeting of Members.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan Pemegang Polis Asuransi Beasiswa Berencana atas tidak dibayarkannya klaim asuransi oleh AJB Bumiputera 1912. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa Pemegang Polis dapat melakukan pengaduan kepada OJK atas tidak dibayarkannya klaim sesuai perjanjian asuransi serta merupakan hak Pemegang Polis untuk memilih menyelesaikan menurut konsep penyelesaian sengketa yang berlaku, baik melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/07/2013 tentang

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Selain itu, pada kondisi tidak dipenuhi klaim asuransi dikarenakan terjadinya kerugian yang tidak mungkin diselamatkan pada AJB Bumiputera 1912, Pemegang Polis selaku anggota dapat mengajukan permintaan pembubaran AJB Bumiputera 1912 dalam Rapat Umum Anggota.

A. Pendahuluan

Anak adalah masa depan bagi setiap orang tua serta merupakan generasi penerus dari kelangsungan suatu bangsa. Setiap anak lahir dengan membawa potensi dasar yang dapat dikembangkan secara optimal. Dalam proses pengembangan potensi anak diperlukan peran aktif dari orang tua. Orang tua berperan sebagai teladan yang memahami perkembangan anak dan juga memberikan pengasuhan serta pendidikan yang seharusnya. Pendidikan merupakan salah satu sarana terpenting dan utama bagi anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya (Siregar, 2013 : 12).

Pentingnya pendidikan mendorong setiap orang tua, agar anak mendapatkan pendidikan terbaik, namun biaya pendidikan yang semakin tinggi setiap tahunnya harus diantisipasi dengan mempersiapkannya sejak dini. Dana pendidikan untuk anak selalu menjadi perencanaan keuangan yang penting agar anak tetap dapat melanjutkan pendidikan. Hal ini didasarkan pada bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

Perencanaan pendidikan yang telah dipersiapkan orang tua tidak lepas dari adanya risiko. Manusia selalu dihadapkan dalam berbagai risiko dalam setiap aspek kehidupannya, baik risiko hidup (jiwanya) maupun risiko harta benda. Risiko dapat timbul dari adanya bencana alam, penyakit, kecelakaan, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, ataupun dari sebab-sebab lain yang tidak dapat diduga sebelumnya (Junaidi Ganie, 2013 : 2). Orang tua dalam hal ini diharapkan dapat memprediksi dan memperhitungkan segala jenis kemungkinan masa depan yang lebih pasti agar orang tua mampu mengelola risiko hidup maupun risiko harta benda sehingga apabila risiko itu terjadi anak tetap dapat melanjutkan pendidikan sebagaimana mestinya. Salah satu cara orang tua untuk mengatasi risiko ialah dengan asuransi beasiswa.

Manfaat utama dari produk asuransi beasiswa adalah memberikan perlindungan atau proteksi kepada orang tua sebagai pencari nafkah, sekaligus memberikan kepastian dana pendidikan jika terjadi sesuatu dengan orang tua dengan memberikan uang pertanggungan kepada yang ditinggalkan yaitu anak, orang tua, atau yang lainnya sesuai dengan ahli waris yang ditunjuk bila tertanggung meninggal. Salah satu perusahaan yang menawarkan produk Asuransi Beasiswa ialah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912.

Secara umum asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian selanjutnya disebut sebagai UU Perasuransian. Asuransi Beasiswa Berencana pada AJB Bumiputera 1912 bersifat sukarela, yang merupakan hasil kesepakatan antara tertanggung dengan penanggung yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam polis. Karena Asuransi Beasiswa Berencana bersifat sukarela, sehingga berlaku dan tunduk kepada ketentuan syarat-syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukum perjanjian pada umumnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Arief Suryono, 2009 : 215).

Berdasarkan Pasal 1315 KUHPperdata dikatakan bahwa setiap perjanjian pada dasarnya hanya mengikat bagi pihak yang membuatnya. Kecuali apabila secara tegas dalam perjanjian tersebut ditunjukkan juga untuk kepentingan pihak ketiga (Pasal 1317 KUHPperdata). Sehingga pada dasarnya perjanjian itu hanya mengikat pada para pihak yang membuatnya, kecuali apabila dalam perjanjian tersebut secara tegas ditunjukkan untuk kepentingan pihak ketiga.

Pada prinsipnya, klaim berhak diperoleh sepanjang terjadi evenemen. Tetapi apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi evenemen maka Pemegang Polis sebagai pihak dalam asuransi jiwa berhak memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung yang jumlahnya telah ditetapkan berdasarkan perjanjian. Evemenen yang terjadi adalah sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian.

Pemegang Polis dapat dikategorikan sebagai konsumen Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Pasal 1 Ketentuan Umum UU OJK menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, Pemegang Polis pada Perasuransian, dan Peserta Pada Dana Pensiun. Dikeluarkannya UU OJK dimaksudkan untuk melindungi konsumen dalam hal ini tertanggung sebagai pihak yang lemah pada umumnya dari produsen/pelaku usaha dalam hal ini perusahaan asuransi. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan Pemegang Polis Asuransi Beasiswa Berencana atas tidak dibayarkannya klaim asuransi oleh AJB Bumiputera 1912.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi serta pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) (Peter

Mahmud Marzuki, 2014: 133-134). Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen, dimana dilakukan dengan mengkaji, dan mempelajari literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen laporan, hasil penelitian, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Asuransi Beasiswa Berencana merupakan produk dari AJB Bumiputera 1912 yang merupakan asuransi swasta yang bersifat komersil, sehingga lahirnya berdasarkan kesepakatan sukarela antara para pihak. Dimana kesepakatan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pihak yang mengikatkan dirinya terhadap penanggung menurut Pasal 304 KUHD orang yang membuat perjanjian disebut sebagai tertanggung. Namun di dalam praktik pertanggung jiwa pada umumnya yang mengadakan perjanjian dengan pihak penanggung disebut dengan istilah Pemegang Polis (Emmy, 1982: 96). Hal ini kemudian diperkuat dengan Undang-Undang Perasuransian yang mana di dalam Pasal 1 menyebutkan mengenai Pemegang Polis sebagai pihak yang mengikatkan dirinya dengan Penanggung dalam perasuransian.

Tanggung jawab AJB Bumiputera 1912 muncul setelah adanya hak dan kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya hubungan hukum penyelenggaraan program asuransi berupa peralihan biaya kelangsungan belajar dari Pemegang Polis atas risiko kematian/jiwa Tertanggung ke Penanggung serta hubungan ke mitraan antara AJB Bumiputera 1912 selaku Pengurus dan Pemegang Polis sebagai anggota.

Polis Asuransi Beasiswa Berencana di dalamnya telah mencantumkan pasal-pasal yang secara tidak langsung memuat hak dan kewajiban yang mengikat bagi masing-masing pihak dalam pelaksanaannya. AJB Bumiputera 1912 dalam Polis Asuransi Beasiswa Berencana memiliki kewajiban:

- a) memberikan uang kelangsungan belajar pada waktu yang telah diperjanjikan dalam Polis apabila tertanggung masih hidup,
- b) memberikan pertanggung dan uang kelangsungan belajar apabila tertanggung meninggal dunia (*evenrment* terjadi),
- c) memberikan nilai tunai kepada Pemegang Polis apabila Pemegang Polis menghentikan asuransinya sebelum masa asuransi berakhir,
- d) memberikan pinjaman maksimal 60% dari nilai tunai Polis apabila Pemegang Polis mengajukan Pinjaman Polis.

Berdasarkan uraian di atas, AJB Bumiputera 1912 memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran klaim kepada Pemegang Polis dan kepada Penerima santunan/yang ditunjuk atas klaim yang diajukannya.

Ada dua hal yang mendasari perusahaan asuransi untuk menolak pembayaran klaim antara lain karena risiko tidak terjadi dan atau karena polis yang bersangkutan tidak menutupi risiko. Suatu risiko tidak tertutupi polis karena di luar lingkungan persetujuan pertanggungan. Itu terjadi apabila polis tidak berlaku lagi atau pihak tertanggung telah menyalahi ketentuan polis yang berlaku. Perkecualian pembayaran klaim Asuransi Beasiswa Berencana AJB Bumiputera 1912 diterakan dalam Pasal 13 Syarat-Syarat Umum Polis Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, sebagai berikut:

- 1) Badan akan membayar nilai tunai kepada yang ditunjuk jika asuransinya sudah mempunyai nilai tunai dan tertanggung meninggal dunia akibat:
 - a) Bunuh diri dalam jangka waktu dua tahun sejak mulai asuransi
 - b) Perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh tertanggung
 - c) Kecelakaan segala bentuk penerbangan non komersial dan tertanggung bertindak selaku pilot atau awak serta tidak membayar premi tambahan aviasi sesuai ketentuan
 - d) Badan akan membayar santunan 50% dari uang pertanggungan, jika tertanggung meninggal dunia akibat penganiayaan, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan teror.
- 2) Badan bebas dari kewajiban untuk membayar santunan dan apapun juga kepada yang ditunjuk jika tertanggung meninggal dunia akibat perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar atau keterlibatan oleh salah satu dari orang lain yang berkepentingan terhadap polis (pemegang polis/yang ditunjuk).

Berdasarkan uraian di atas, di luar pengecualian yang tertera AJB Bumiputera 1912 memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran klaim Pemegang Polis dan kepada Penerima Santunan/yang ditunjuk atas klaim yang diajukannya.

Pasal 31 ayat (4) UU Perasuransian memberikan upaya Perlindungan terhadap Pemegang Polis dengan menegaskan bahwa Perusahaan Asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim. Sehingga, apabila Pemegang Polis sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, maka pihak AJB Bumiputera 1912 harus segera memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim.

Selain itu, dalam Pasal 53 UU Perasuransian memberikan amanat agar seluruh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syari'ah menjadi peserta program Penjamin Polis. Hal ini dimaksudkan agar menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak pemegang Polis atau Peserta Asuransi dicabut izinnya atau dilikuidasi. Namun hingga saat ini, undang-undang yang mengatur mengenai program penjamin polis sebagaimana diamanatkan UU Perasuransian belum terealisasikan.

UU Perasuransian sendiri juga masih belum mengatur secara spesifik mengenai upaya yang dapat dilakukan Pemegang Polis Asuransi apabila Perusahaan Asuransi tidak dapat membayarkan klaim asuransi Pemegang

Polis. UU Perasuransian lebih banyak memberikan amanat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator lembaga keuangan Asuransi. Sebagai upaya preventif dalam hal perlindungan konsumen jasa keuangan, OJK selaku regulator mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) ataupun Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), diantaranya adalah POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang didalamnya banyak memutuskan mengenai perilaku-perilaku usaha serta POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan SEOJK Nomor 17/SEOJK.07/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal terjadinya kerugian materiil akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakati, Pemegang Polis dapat melakukan pengaduan kepada OJK melalui pelayanan pengaduan dengan mengirimkan surat tertulis yang ditujukan kepada: Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen atau melalui layanan telepon, surat elektronik (e-mail), dan form pengaduan online. Dengan adanya pengaduan yang dilakukan Pemegang Polis maka OJK berwenang memberikan sanksi administratif apabila Perusahaan Asuransi terbukti melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan/ atau telah menyebabkan kerugian materiil akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakati dengan Pemegang Polis. OJK dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa: Peringatan tertulis, Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, Pembatasan kegiatan usaha, Pembekuan kegiatan usaha, Pencabutan izin kegiatan usaha.

Pada prinsipnya penyelesaian pengaduan atau sengketa konsumen di sektor jasa keuangan wajib dilakukan terlebih dahulu melalui mekanisme *Internal Dispute Resolution* (IDR) berdasarkan asas musyawarah untuk mencapai mufakat (sebagai first line of resolution). Apabila penyelesaian pengaduan yang dilakukan melalui mekanisme IDR oleh lembaga jasa keuangan tidak mencapai kesepakatan Pemegang Polis dapat melakukan upaya penyelesaian melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi. Hal ini didasarkan pada bunyi Pasal 39 POJK No. 1/07/2013 sebagai berikut:

- 1) Dalam hal tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.
- 3) Dalam hal penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konsumen dapat menyampaikan permohonan kepada otoritas jasa keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di pelaku usaha jasa keuangan.

Penyelesaian non-litigasi dalam Perasuransian dapat dilakukan melalui lembaga arbitrase yaitu BMAI (Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia).

BMAI memberikan pelayanan untuk penyelesaian sengketa klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat) asuransi antara anggotanya yaitu perusahaan asuransi dan tertanggung atau pemegang polis baik melalui Mediasi, Konsiliasi, maupun Arbitrase.

Selain penyelesaian sengketa diluar pengadilan/non litigasi, Pemegang Polis juga dapat melakukan upaya hukum melalui jalur gugatan ke Pengadilan Negeri. Pemegang Polis dalam hal tidak dibayarkannya klaim sesuai dengan Perjanjian dalam Polis dapat melakukan Gugatan Wanprestasi atas tidak dibayarkannya klaim/keterlambatan pembayaran klaim ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan kantor Pusat AJB Bumiputera 1912 maupun Kantor-kantor di Daerah dimana Kantor Pusat Badan mempunyai Kantor atau tempat kedudukan Pemegang Polis.

Dalam kondisi keterlambatan dan tidak dibayarkannya klaim Pemegang Polis diakibatkan terjadinya kerugian pada AJB Bumiputera 1912 yang tidak mungkin untuk diselamatkan, Pemegang Polis AJB Bumiputera 1912 selaku anggota juga dapat mengajukan permintaan pembubaran AJB Bumiputera 1912 sebagaimana tertera dalam Pasal 35 Syarat-Syarat Khusus Polis dan Anggaran Dasar AJB Bumiputera 1912:

- 1) Pembubaran Bumiputera 1912 hanya dapat terjadi atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh jumlah anggota Bumiputera 1912, yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh jumlah uang pertanggungan Bumiputera 1912 dan disetujui oleh sedikit-dikitnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Peserta Rapat Umum Anggota, Dewan Komisaris, atau Direksi.
- 2) Pembubaran Bumiputera 1912 sebagaimana Ayat (1) Pasal ini, sebagai akibat kerugian yang bukan disebabkan faktor kesalahan pengelolaan perusahaan, likuidasi dilakukan sebagaimana dalam Pasal 36.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama, dalam hal RUA menyetujui penghentian kegiatan usaha, Usaha Bersama wajib menyampaikan rencana penghentian kegiatan usaha kepada OJK untuk mendapatkan persetujuan. Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha, Usaha Bersama wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

RUA harus berupaya menjaga kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan Anggota, tertanggung, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat. Keputusan RUA dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian. OJK berwenang membatalkan keputusan RUA dalam hal:

- a. Dinilai berpotensi membahayakan kepentingan Usaha Bersama;
- b. Dinilai berpotensi membahayakan industri perasuransian; dan/atau
- c. Tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal OJK memberikan persetujuan atas rencana penghentian kegiatan usaha, AJB Bumiputera 1912 wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Anggaran Dasar.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi Pemegang Polis dalam praktiknya masih jauh dari kata sempurna, padahal perlindungan hukum Pemegang Polis sangat krusial dan mempunyai pengaruh bagi pasar dan iklim Perasuransian. Adanya perlindungan hukum ini merupakan salah satu media untuk menegakkan keadilan.

D. Simpulan

Upaya yang apat dilakukan Pemegang Polis dalam kondisi tidak dipenuhinya klaim asuransi:

1. Melakukan pengaduan kepada OJK atas kerugian materiil akibat tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakati,
2. Pemegang Polis memiliki hak untuk memilih menyelesaikan permasalahan menurut konsep penyelesaian sengketa yang berlaku, baik melalui pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam POJK No. 1/07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan,
3. Pemegang Polis selaku anggota dapat mengajukan permintaan pembubaran AJB Bumiputera 1912 dalam Rapat Umum Anggota apabila klaim tidak dibayarkan dikarenakan terjadinya kerugian sehingga tidak mungkin diselamatkan yang dialami AJB Bumiputera 1912.

E. Saran

Kepada Calon Pemegang Polis hendaknya mempelajari dan memahami isi Polis terlebih dahulu serta meminta penjelasan lebih rinci kepada pihak AJB Bumiputera 1912 tentang hal-hal yang belum dipahami sebelum menandatangani Polis Asuransi. Perlunya peningkatan kemampuan OJK dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap calon Pemegang Polis dalam Perasuransian guna menghindari kesalahpahaman serta sengketa yang mungkin terjadi dikemudian hari. Disisi lain, pemerintah harus segera mewujudkan amanat UU Perasuransian mengenai Lembaga Penjamin Polis demi keamanan dana Pemegang Polis dalam perasuransian.

F. Daftar Pustaka

Buku

- A. Junaidi Ganie. 2013. *Hukum Asuransi. Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1980, *Hukum Pertanggunggaan*, Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Arfan Kaimudin. 2019. "Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia". *Jurnal Yurispruden*. Vol. 2, No.1, 2019. Malang : Universitas Islam Malang.
- Andi Muhammad Reza Pahlevi N & Fandi Ramadhan. 2018. "Proses Penyelesaian Sengketa Perasuransian di Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)". *Jurnal Binamulia Hukum*. Vol. 7. No. 2, Desember 2018. Jakarta : Universitas Krisnadwipayana.
- Arief Suryono. 2009. "Asuransi Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 9 No. 3, September 2009. Purwokerto : UNSOED.
- Deny Guntara. 2016. "Asuransi dan Ketentuan-Ketentuan Hukum yang Mengaturinya". *Jurnal Justisi Ilmu Hukum*. Vol 1. No. 1. 2016. Karawang: Universitas Buana Perjuangan.
- Jay M. Feinman. 2019. "Contract and Claim in Insurance Law". *Connecticut Insurance Law Journal*". Vol. 25 No. 1, 16 May 2019. Hartford : University of Connecticut.
- Muh. Zulfikar S Kamah. 2015. "Aspek Hukum Pengalihan Tanggung Jawab Hukum pada Perjanjian Asuransi". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 6, Vol 3 Tahun 2015. Palu : UNTAD.
- N.N.S Sinegar. 2013. "Persepsi Orangtua terhadap Pentingnya Pendidikan Bagi Anak". *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol. 1 No. 1. Medan : Universitas Medan Area.
- Retno Wulansari. 2017. "Pemaknaan Prinsip Kepentingan dalam Hukum Asuransi di Indonesia". *Jurnal Panorama Hukum*. Vol. 2 No. 1, Juni 2017. Malang : Universitas Kanjuruhan Malang.
- Sofiatul Ibtisam Madihah. 2020. "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama yang Mengalami Likuiditas (Studi di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Cabang Bondowoso)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. 26 No. 6, Februari 2020. Malang : Universitas Islam Malang.